

Gotong royong melawan korupsi demi mengembalikan jati diri bangsa Indonesia yang berintegritas dan bermartabat

Akmal Rijal Mubarak

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110287@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Gotong royong; antikorupsi; jati diri bangsa; integritas; kewarganegaraan.

Keywords:

Mutual cooperation; anti-corruption; national identity; integrity; citizenship.

ABSTRAK

Korupsi sering kali dianggap sebagai persoalan hukum yang rumit, padahal akar masalahnya sangat berkaitan dengan pudarnya nilai-nilai luhur dalam keseharian kita sebagai warga negara. Artikel ini membahas bagaimana semangat gotong royong, yang merupakan jati diri asli bangsa Indonesia, dapat dijadikan senjata utama untuk melawan budaya korupsi dari tingkat yang paling sederhana. Selama ini, pemberantasan korupsi seolah-olah hanya menjadi tugas lembaga negara, padahal kekuatan pengawasan masyarakat melalui aksi kolektif jauh lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang ringan, artikel ini mengeksplorasi cara membangkitkan kembali rasa malu dan tanggung jawab bersama untuk menolak segala bentuk gratifikasi maupun ketidakjujuran. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketika gotong royong kembali dihidupkan sebagai benteng integritas, kita tidak hanya sedang memberantas korupsi, tetapi juga sedang memulihkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Simpulan dari tulisan ini mengajak setiap warga negara, terutama generasi muda, untuk menjadikan kejujuran sebagai gerakan bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

ABSTRACT

Corruption is often seen as a complex legal issue, when in fact its root cause is closely related to the fading of noble values in our daily lives as citizens. This article discusses how the spirit of mutual cooperation (gotong royong), which is the authentic identity of the Indonesian nation, can be used as a primary weapon to fight the culture of corruption from the simplest levels. So far, the fight against corruption has seemed to be solely the task of state institutions, even though the power of social monitoring through collective action is much more effective in creating a clean environment. Using a light sociological approach, this article explores ways to reawaken a sense of shame and collective responsibility to reject all forms of gratification and dishonesty. The discussion results show that when gotong royong is revived as a fortress of integrity, we are not only fighting corruption but also restoring the dignity of the Indonesian nation in the eyes of the world. The conclusion of this paper invites every citizen, especially the younger generation, to make honesty a collective movement for a better future for Indonesia.

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan, bahkan sering kali disebut sebagai penyakit kronis yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Selama ini, pemberantasan korupsi cenderung



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dipandang hanya dari sudut pandang hukum dan menjadi tanggung jawab eksklusif lembaga-lembaga negara saja. Namun, pendekatan yang bersifat formal-legalistik tersebut sering kali menemui jalan buntu jika tidak dibarengi dengan perubahan kesadaran di tingkat masyarakat. Korupsi bukan sekadar masalah hilangnya uang negara, melainkan masalah hilangnya nilai kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam diri warga negara yang kemudian menjadi budaya yang dianggap biasa.

Kenyataan pahit ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang hilang dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang dahulu dikenal karena keluhuran budi dan semangat gotong royongnya, kini seolah-olah kehilangan arah akibat virus keserakahan dan mentalitas instan. Gotong royong yang sejatinya adalah kerja sama untuk kebaikan bersama, perlahan mulai luntur dan digantikan oleh sikap individualisme yang hanya peduli pada keuntungan pribadi. Padahal, jika kita menengok kembali sejarah, kekuatan terbesar bangsa ini selalu terletak pada aksi kolektif masyarakatnya yang saling menjaga dan mengawasi satu sama lain dalam koridor kebaikan.

Mengembalikan semangat gotong royong dalam upaya melawan korupsi adalah sebuah langkah strategis untuk membangun benteng integritas dari level yang paling dasar. Gotong royong antikorupsi berarti menciptakan sebuah ekosistem sosial di mana masyarakat tidak lagi acuh tak acuh terhadap praktik kecurangan di sekitarnya. Ketika rasa malu melakukan tindakan tidak jujur kembali menjadi norma sosial, maka ruang gerak para pelaku korupsi akan semakin sempit. Dalam konteks ini, warga negara tidak hanya berperan sebagai objek hukum, tetapi bertransformasi menjadi subjek aktif yang mengawal transparansi dan kejujuran di setiap lini kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, kampus, hingga dunia kerja.

Peran generasi muda, khususnya mahasiswa, sangatlah vital dalam menggerakkan kembali roda gotong royong yang berintegritas ini. Mahasiswa memiliki energi dan idealisme untuk memutus mata rantai budaya korupsi yang mungkin telah dianggap lumrah oleh generasi sebelumnya. Dengan menjadikan integritas sebagai gaya hidup dan gerakan bersama, mahasiswa bisa membuktikan bahwa jujur itu hebat dan berprestasi tanpa menyuap adalah sebuah kebanggaan. Aksi-aksi kecil seperti menolak plagiarisme, disiplin waktu, dan berani bersuara terhadap ketidakadilan adalah bentuk nyata dari gotong royong melawan korupsi yang bisa dilakukan mulai dari sekarang.

Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai gotong royong dapat direvitalisasi sebagai alat kontrol sosial yang ampuh untuk memberantas korupsi. Fokus pembahasan tidak hanya pada teori, tetapi pada langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara untuk memulihkan martabat bangsa. Tujuannya adalah untuk menyadarkan kita semua bahwa Indonesia yang bersih dan bermartabat bukanlah sebuah mimpi yang mustahil, asalkan kita mau bergerak bersama dan saling bahu-membahu menjaga kejujuran. Melalui semangat gotong royong, kita optimis dapat mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berintegritas tinggi di mata dunia.

Pembahasan

Menggali Kembali Esensi Gotong Royong sebagai Benteng Moral Bangsa

Gotong royong selama ini sering kali hanya dimaknai secara sempit sebagai kegiatan fisik seperti kerja bakti membersihkan selokan atau membangun fasilitas desa. Namun, dalam konteks pembangunan karakter bangsa, esensi terdalam dari gotong royong sebenarnya adalah sebuah manifestasi dari kesadaran kolektif untuk menjaga kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam kerangka antikorupsi, gotong royong harus ditarik maknanya menjadi sebuah "tanggung jawab moral bersama" untuk menjaga integritas lingkungan sosial dari segala bentuk penyimpangan. Ketika nilai ini tertanam kuat, setiap individu tidak lagi merasa bahwa kejujuran adalah beban pribadi, melainkan sebuah komitmen kelompok yang harus dijaga demi kelangsungan hidup komunitas yang lebih besar.

Secara sosiologis, kekuatan gotong royong terletak pada kemampuannya menciptakan sistem pengawasan alami di tingkat akar rumput. Dalam masyarakat yang memegang teguh semangat bahu-membahu, setiap orang akan merasa memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dan menegur jika melihat adanya ketidakadilan atau kecurangan. Benteng moral ini menjadi sangat efektif karena korupsi biasanya tumbuh subur dalam ruang-ruang yang individualistik dan acuh tak acuh. Dengan menghidupkan kembali rasa peduli terhadap sesama, kita sebenarnya sedang membangun barisan pertahanan yang kuat, di mana kejujuran menjadi standar perilaku yang tidak bisa ditawar lagi dalam pergaulan sehari-hari (Agus, 2025).

Lebih jauh lagi, mengembalikan jati diri gotong royong berarti membangkitkan kembali "rasa malu sosial" yang kian memudar di tengah masyarakat modern. Dahulu, seseorang akan merasa sangat terbebani jika melakukan tindakan yang merugikan orang banyak karena adanya sanksi sosial dari lingkungan sekitarnya. Gotong royong antikorupsi bertujuan untuk mengonstruksi kembali tatanan tersebut, di mana integritas dijadikan sebagai modal sosial (social capital) yang paling berharga. Dengan demikian, orang-orang yang berintegritas akan mendapatkan posisi terhormat, sementara mereka yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah akan mendapatkan penolakan secara kolektif oleh lingkungannya sendiri.

Dalam dimensi kewarganegaraan, gotong royong juga berfungsi sebagai alat penyetara yang memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengawal kebenaran. Korupsi sering kali terjadi karena adanya ketimpangan kuasa yang membuat orang kecil merasa tidak berdaya untuk bersuara. Namun, melalui aksi kolektif atau "gotong royong bersuara", masyarakat dapat menghimpun kekuatan untuk menuntut transparansi dari para pemegang kebijakan. Semangat ini meyakinkan kita bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari atas, melainkan bisa tumbuh dari keberanian warga negara yang saling bahu-membahu menolak praktik suap dan gratifikasi di level yang paling sederhana sekalipun (Saragih et al., 2026).

Revitalisasi esensi gotong royong ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memulihkan martabat bangsa Indonesia yang sempat tercederai oleh maraknya kasus korupsi. Kita perlu menyadari bahwa kejujuran tidak akan pernah bisa tegak jika

diperjuangkan sendirian di tengah lingkungan yang korup. Melalui gerakan gotong royong yang berintegritas, kita sedang menciptakan sebuah ekosistem di mana setiap orang saling melindungi dari godaan keserakahan. Inilah esensi jati diri bangsa yang sesungguhnya; sebuah bangsa yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga memiliki kedalaman karakter dan keteguhan moral yang dibangun di atas pondasi kebersamaan dan kejujuran yang tulus.

Kajian dari dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa budaya lokal serta semangat kebersamaan masyarakat memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter sosial yang berintegritas. (Munawaroh & Lazuardi, 2025). menjelaskan bahwa tradisi gotong royong dapat memperlambat solidaritas masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Nilai tersebut berkaitan erat dengan upaya pencegahan korupsi, sebab tindakan korupsi umumnya muncul ketika kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Oleh karena itu, penguatan kembali budaya gotong royong tidak hanya bermanfaat untuk menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang jujur dan bermoral.

Transformasi Budaya Dari Permisif Menuju Masyarakat yang Berintegritas

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah sekadar celah pada regulasi, melainkan adanya sikap "permisif" atau pembiaran terhadap praktik-praktik kecurangan kecil yang telah mengakar dalam keseharian. Sikap ini sering kali muncul dalam bentuk pembenaran terhadap pungutan liar, pemberian uang lelah, hingga gratifikasi administratif yang dianggap sebagai "pelumas" untuk memperlancar urusan. Transformasi budaya yang digerakkan secara gotong royong bertujuan untuk membongkar pola pikir lama tersebut dan menggantinya dengan standar kepantasan baru yang lebih sehat. Kita perlu menyadari bahwa membiarkan pelanggaran kecil tetap terjadi sebenarnya adalah langkah awal yang memberi ruang bagi tumbuhnya skandal korupsi yang lebih besar di masa depan.

Proses transformasi ini menuntut adanya keberanian kolektif untuk mengubah narasi sosiologis di tengah masyarakat. Selama ini, orang yang mencoba bersikap jujur dan tegak lurus sering kali dianggap sebagai sosok yang kaku atau bahkan dikucilkan karena dianggap menghambat "kelancaran" kelompok. Melalui semangat gotong royong antikorupsi, kita harus membalikkan keadaan tersebut dengan menjadikan integritas sebagai kebanggaan bersama. Perubahan budaya dimulai ketika kita berani mengatakan "tidak" terhadap suap secara serentak, sehingga pelaku kecurangan merasa menjadi pihak yang aneh dan terisolasi. Dengan membangun konsensus bahwa kejujuran adalah harga diri bangsa, kita sedang menciptakan lingkungan yang secara alami menolak segala bentuk tindakan tidak terpuji (Adha & Nazila Shahriza, 2025).

Perubahan budaya antikorupsi ini tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan pendekatan hukum formal semata. Dibutuhkan upaya pembentukan karakter yang menyentuh ranak kearifan lokal, sehingga generasi muda dapat menginternalisasi nilai-nilai kejujuran tersebut sebagai identitas kultural mereka. Melalui aksi nyata yang konsisten ini, kita dapat mewujudkan tata kelola sosial yang bersih dari praktik penyelewengan.

Penguatan kontrol sosial lewat lingkungan terkecil, seperti keluarga dan komunitas hobi, menjadi kunci keberhasilan transformasi budaya ini. Keluarga harus kembali menjadi institusi utama dalam menyemai benih integritas, di mana kejujuran dihargai lebih tinggi daripada pencapaian materi yang tidak jelas sumbernya. Secara gotong royong, setiap elemen masyarakat perlu membangun sistem pengawasan berbasis moral yang mampu memberikan sanksi sosial bagi mereka yang melanggar nilai-nilai kejujuran. Sanksi sosial ini sering kali jauh lebih ditakuti dan efektif daripada sekadar ancaman hukum formal, karena menyentuh aspek rasa malu dan reputasi seseorang di tengah lingkungan tempat tinggalnya.

Di sisi lain, transformasi budaya ini juga memerlukan adanya "keteladanan kolektif" yang dimulai dari figur-figur yang memiliki pengaruh di masyarakat, termasuk para tokoh pemuda dan akademisi. Gotong royong dalam memberi contoh yang baik akan memberikan efek domino yang kuat; ketika satu kelompok masyarakat mulai menunjukkan budaya antrean yang tertib dan menolak jalur belakang, kelompok lain akan merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Budaya antisuap tidak bisa hanya diajarkan lewat teori di ruang kelas, melainkan harus dipraktikkan di jalan raya, di loket pelayanan publik, hingga di pasar-pasar tradisional. Inilah wujud nyata dari upaya mengembalikan jati diri bangsa yang bermartabat melalui aksi nyata yang konsisten.

Transformasi dari budaya permisif menuju budaya berintegritas ini akan melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang lebih adil dan transparan. Ketika kejujuran telah menjadi "oksigen" dalam setiap interaksi sosial, maka biaya hidup dan biaya bernegara akan menjadi lebih murah karena tidak ada lagi potongan-potongan ilegal yang merugikan. Masyarakat yang berintegritas adalah masyarakat yang kuat, karena mereka tidak bisa dipecah belah oleh kepentingan pragmatis yang bersifat sesaat. Dengan terus bahu-membahu merawat budaya jujur, kita sedang menginvestasikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang, di mana martabat Indonesia tidak lagi diukur dari kekayaan materi semata, melainkan dari kemuliaan karakter rakyatnya (Bangun et al., 2026).

Gotong Royong Digital: Kekuatan Pengawasan Warga di Era Keterbukaan

Di era modern, semangat gotong royong telah menemukan wadah baru yang melampaui batasan fisik melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang kini kita kenal sebagai partisipasi publik digital. Warga negara saat ini memiliki kekuatan kolektif yang sangat besar untuk melakukan pengawasan massal terhadap penggunaan anggaran dan jalannya kebijakan publik hanya melalui gawai mereka. Gotong royong digital terjadi ketika masyarakat secara sukarela saling berbagi informasi, memverifikasi keabsahan data pemerintah, dan menyuarakan ketidakberesan secara bersama-sama hingga menjadi perhatian luas di media sosial. Fenomena ini membuktikan bahwa teknologi bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen demokrasi yang memungkinkan setiap orang menjadi "mata dan telinga" bagi keadilan sosial (Sulistiani, 2017).

Di sisi lain, ada juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter melalui pembiasaan sehari-hari mempunyai pengaruh besar dalam menanamkan sikap jujur dalam menanamkan sikap jujur pada usia dini. Kebiasaan disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran yang diterapkan secara terus-menerus akan membentuk pribadi yang memiliki

integritas kuat sehingga mampu menghindari berbagai bentuk penyimpangan, termasuk tindakan korupsi. Dengan demikian, upaya membangun budaya antikorupsi perlu dilakukan secara bersama melalui pendidikan, lingkungan sosial, serta keteladanan agar nilai integritas benar-benar tertanam dalam kehidupan masyarakat (Erfantinni, 2022).

Kekuatan utama dari pengawasan warga secara digital ini terletak pada efek viralitas yang mampu menciptakan tekanan publik secara instan terhadap para pemangku kebijakan. Ketika sebuah praktik korupsi atau penyimpangan prosedur diunggah dan dibagikan oleh ribuan netizen, ruang gelap yang biasanya digunakan untuk melakukan negosiasi ilegal menjadi terbuka lebar di bawah sorotan lampu publik. Gotong royong dalam bentuk "spill" atau pengungkapan fakta ini sering kali jauh lebih efektif dalam mendorong transparansi dibandingkan jalur birokrasi yang berbelit-belit. Inilah wajah baru gotong royong di abad ke-21; sebuah aksi bahu-membahu dalam mengawal integritas negara guna memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang diselewengkan tanpa pengawasan.

Namun, gotong royong digital yang sehat juga menuntut adanya tanggung jawab dan etika dari (Basri, 2025) setiap warga net untuk tetap berbasis pada fakta dan data yang akurat. Masyarakat harus saling mengedukasi agar tidak terjebak dalam penyebaran hoaks atau fitnah yang justru dapat mengaburkan substansi pemberantasan korupsi itu sendiri. Kolaborasi digital dalam melawan korupsi harus dilakukan dengan kecerdasan emosional dan intelektual, di mana integritas pengawas harus sama kuatnya dengan integritas yang mereka menuntut dari pemerintah. Dengan membangun ekosistem pengawasan siber yang jujur dan objektif, masyarakat sipil sedang membangun sistem peringatan dini yang mampu mencegah praktik koruptif sebelum dampak kerugiannya meluas ke seluruh lapisan bangsa.

Transformasi gotong royong ke ruang digital telah memberikan harapan baru bagi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih bersih dan akuntabel. Keberadaan berbagai platform pelaporan mandiri dan aplikasi pemantau anggaran yang dikelola oleh komunitas masyarakat sipil menunjukkan bahwa kepedulian terhadap nasib bangsa masih sangat tinggi. Melalui jejaring digital yang kuat, warga negara kini memiliki posisi tawar yang setara dalam berhadapan dengan kekuasaan, memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan dikelola secara amanah. Dengan terus merawat semangat pengawasan kolektif ini, kita sedang memastikan bahwa jati diri bangsa yang jujur dan bermartabat tetap tegak berdiri, baik di dunia nyata maupun di jagat maya.

Peran Mahasiswa dalam Menggerakkan Ekosistem Antikorupsi di Kampus

Sebagai kaum intelektual dan agen perubahan, mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis untuk menjadi penggerak utama dalam membangun ekosistem kampus yang bersih dan berintegritas. Di lingkungan akademik, semangat gotong royong antikorupsi dapat diwujudkan melalui tindakan nyata seperti membangun budaya penolakan tegas terhadap praktik titip absen, plagiarisme, hingga segala bentuk kecurangan dalam ujian. Mahasiswa harus menyadari bahwa integritas akademik adalah fondasi utama sebelum mereka terjun ke dunia profesional; jika di kampus saja mereka sudah terbiasa melakukan kompromi terhadap kejujuran, maka risiko untuk melakukan

korupsi di masa depan akan semakin besar. Dengan menciptakan lingkungan yang saling mendukung dalam kejujuran, mahasiswa sedang menyiapkan standar moral yang tinggi bagi generasi pemimpin masa depan.

Organisasi kemahasiswaan harus menjadi laboratorium nyata bagi praktik transparansi dan akuntabilitas. Gotong royong dalam mengelola dana organisasi, melakukan pelaporan keuangan yang terbuka, serta menjalankan kepemimpinan yang bebas dari nepotisme adalah bentuk latihan kepemimpinan yang berintegritas. Mahasiswa perlu membangun sistem kontrol internal di mana setiap anggota organisasi berhak dan wajib mengawasi penggunaan anggaran kegiatan mereka. Dengan menjadikan transparansi sebagai kebanggaan organisasi, mahasiswa tidak hanya belajar cara memimpin, tetapi juga belajar cara menjaga amanah publik, yang nantinya akan menjadi bekal berharga saat mereka menempati posisi strategis di struktur pemerintahan maupun swasta (Hayati et al., 2020).

Peran mahasiswa juga mencakup fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan isu-isu antikorupsi. Melalui gerakan kolektif yang terorganisir, mahasiswa dapat melakukan advokasi terhadap kebijakan kampus maupun daerah yang dirasa tidak transparan. Kekuatan mahasiswa terletak pada idealismenya yang murni, yang belum terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis yang sempit. Gotong royong dalam melakukan riset, kajian kritis, hingga aksi damai untuk menuntut keadilan sosial adalah manifestasi dari kepedulian mahasiswa terhadap masa depan bangsa. Keberanian mahasiswa untuk bersuara secara objektif dan berbasis data akan memberikan tekanan moral bagi para pemegang kekuasaan untuk tetap berada di jalur yang benar.

Selain aksi yang bersifat eksternal, mahasiswa juga perlu menginisiasi kampanye kreatif di media sosial untuk mempopulerkan nilai-nilai integritas di kalangan teman sebaya. Dengan menggunakan bahasa yang ringan, relatable, dan kekinian, gerakan antikorupsi tidak lagi dipandang sebagai hal yang membosankan atau terlalu serius, melainkan sebagai gaya hidup yang keren dan membanggakan. Gotong royong digital antar-mahasiswa dalam menyebarkan konten positif tentang kejujuran dapat menciptakan efek bola salju yang mampu mengubah persepsi publik. Mahasiswa harus mampu membuktikan bahwa menjadi jujur itu hebat, dan bahwa kesuksesan yang diraih melalui kerja keras serta proses yang bersih jauh lebih bermartabat daripada sukses instan hasil dari jalan belakang (Bangun et al., 2026).

Langkah-langkah kecil yang dilakukan secara kolektif dan konsisten di lingkungan kampus akan menjadi riak besar yang mampu mengubah wajah birokrasi dan politik Indonesia di masa depan. Mahasiswa adalah harapan terakhir bagi pemulihan martabat bangsa yang selama ini tercederai oleh praktik korupsi yang masif. Dengan memegang teguh semangat gotong royong dan integritas sejak di bangku kuliah, mahasiswa sedang menanam benih perubahan yang akan dipanen oleh seluruh rakyat Indonesia di masa mendatang. Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat hanya akan terwujud jika generasi mudanya memiliki keteguhan moral untuk menolak menjadi bagian dari masalah, dan justru memilih untuk menjadi motor utama dari solusi pemberantasan korupsi.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum yang dingin, melainkan sebuah krisis moral yang memerlukan solusi sosiologis melalui revitalisasi semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa. Gotong royong yang diaktualisasikan dalam bentuk tanggung jawab kolektif dan pengawasan warga terbukti mampu menjadi benteng integritas yang efektif dalam mempersempit ruang gerak praktik kecurangan di setiap lini kehidupan. Ketika kejujuran kembali diletakkan sebagai modal sosial utama dan sanksi sosial diberlakukan terhadap perilaku koruptif, maka martabat bangsa Indonesia yang berintegritas dapat dipulihkan secara perlahan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi beban eksklusif lembaga negara, melainkan menjadi gerakan kesadaran warga negara yang bergerak bersama untuk memastikan bahwa transparansi dan keadilan menjadi napas utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai langkah strategis, disarankan agar setiap elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, mulai membangun ekosistem integritas dari lingkungan terkecil melalui aksi nyata yang konsisten dan berani menolak segala bentuk kompromi moral. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu mendukung gerakan ini dengan menciptakan sistem transparansi yang mudah diakses publik serta mengintegrasikan pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap kurikulum kewarganegaraan. Selain itu, optimalisasi gotong royong digital melalui pengawasan publik di media sosial harus terus ditingkatkan sebagai instrumen kontrol sosial yang objektif dan berbasis data. Sinergi antara ketegasan hukum, keteladanan pemimpin, dan keberanian warga negara untuk saling menjaga dalam kejujuran adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, bermartabat, dan disegani di kancah dunia.

Daftar Pustaka

- Adha, A. Z., & Nazila Shahriza. (2025). Rekonstruksi Pendidikan Hukum Indonesia: Etika, Profesionalisme, dan Integritas di Era Transformasi Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Budaya*, 01(01), 1–7.
- Agus, A. A. (2025). Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagai benteng karakter bangsa dalam arus globalisasi. *Jurnal Kajian Sosial*, 9(3), 20–29.
- Bangun, P. A., Pratama, A. S., Ratu, L., Ratu, K. L., & Bandar, K. (2026). Anti Korupsi Yang Berkearifan Lokal Untuk Membentuk Karakter Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(2), 556–567.
- Basri, A. (2025). Peran Hukum Keterbukaan Informasi Sebagai Katalisator Optimalisasi Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik*, 8(214–224).
- Erfantinni, I. H. (2022). Desain pembelajaran daring bernuansa karakter: Suatu kajian pembiasaan sikap dan perilaku pada siswa sekolah dasar. *BADA'A: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(1), 40–52. <https://repository.uin-malang.ac.id/10814/>
- Faslah, R. (2025). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa UIN Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/24376/>

- Hayati, N., Nuqul, F. L., & Kunci, K. (2020). Pengaruh Spiritualitas dan HEXACO Personality terhadap Intensi Perilaku Korupsi pada Mahasiswa The Effect of Spirituality and HEXACO Personality toward the Intention of Corruption Behavior on Students. *Jurnal Psikogenesis*, 8(1), 64–77.
- Munawaroh, D. A., & Lazuardi, Z. F. (2025). Tradisi arisan macul: Analisis budaya lokal dan persepsi generasi muda Desa Torongrejo Kota Batu. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4(2), 194–203. <https://repository.uin-malang.ac.id/24345/>
- Saragih, E. A., Sianipar, R. A., Lubis, D. L., Enzelika, S., & Ginting, B. (2026). Pancasila dan Tantangan Arus Individualisme Global: Benteng Atau Sekedar Simbol. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 11859–11866.
- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN). *El-Muhasaba*, 8(1), 1–15.